

FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI MALUKU UTARA

Suratno Amiro

Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Keuangan
Konsentrasi Keuangan Daerah
Universitas Khairun Tahun 2014

Abstract: *expenditure flypaper effect In North Maluku Provincial Government. Commission supervising the Abdul Hadi Sirat and commission supervising two Irvan Zam Zam. The purpose of the study was to analyze the effect of local revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) of the Local Government Expenditure North Maluku province, as well as analyze the phenomenon of flypaper. Object of this study is all kabupaten/ cities in North Maluku province except the island of Morotai, and the focus of research is the realization of the budget year report 2004-2011. The population in this study is the province of North Maluku and the sample was 8 districts/ cities except the island of Morotai, the analysis used is multiple linear regression analysis using SPSS. The results of this study, the first to show that the variable revenue (PAD) does not significantly influence the Local Government Expenditure and General Allocation Fund significantly influence the Local Government Expenditure. Both the value of Standardized Coefficients revenue (PAD) is not greater than the value of the Standardized Coefficients General Allocation Fund (DAU), and only the General Allocation Fund (DAU) significantly affects Expenditure. This means that the flypaper on Local Government Expenditure.*

Keywords : *Regional Revenue, General Allocation Fund, Expenditure, Flypaper Effect.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bastian (2001) menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah (dalam Dwirandra, 2008).

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan tuntutan daerah yang sudah lama

digemakan sekaligus sebagai langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Priyo, 2006). Desentralisasi dimaknai dalam tiga aspek. Pertama sebagai pelepasan tanggung jawab pusat kepada daerah, secara langsung dimaknai sebagai pelepasan daerah sebagai pelaksana dan pengambil keputusan administrasi dengan bimbingan teknis oleh pusat. Kedua sebagai delegasi yang berkaitan dengan situasi dimana daerah bertindak atas nama pemerintah pusat. Ketiga sebagai devolusi dimana pelimpahan kewenangan untuk memutuskan sesuatu di daerah. Menilik pada konteks desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, konsekuensinya adalah adanya juga akan mempengaruhi tanggung jawab dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (intergovernmental fiscal relations). Hubungan keuangan antar pemerintah merujuk pada hubungan keuangan antara berbagai

tingkatan pemerintah dalam suatu negara dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan Negara dan pola pengeluarannya termasuk kekuasaan. Mulai dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi terhadap tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Handayani, 2009).

Berkaitan dengan hal tersebut, Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Artinya daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan belanja daerahnya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (dalam Dwirandra, 2008). Jadi, PAD harus menjadi basis utama penerimaan daerah dibandingkan dengan DAU agar daerah mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi seutuhnya.

Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi, hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat

besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Fakta di atas memperlihatkan bahwa perilaku fiskal pemerintah daerah dalam merespon transfer dari pusat menjadi determinan penting dalam menunjang efektivitas kebijakan transfer. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. *Flypaper effect* merupakan fenomena dalam penelitian ini. Maimunah (2006) menyatakan bahwa *Flypaper effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Bukti-bukti empiris secara umum menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan hasil governansinya. Hal ini berarti pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang digali dari masyarakat sendiri dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat (Kuncoro, 2007:3).

Karena itulah peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh sebenarnya DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah dan apakah terjadi *flypaper effect* terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku Utara. Dua hal yang dapat terjadi pada penelitian ini adalah terjadi atau tidaknya *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah. Jika penelitian ini mengindikasikan telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah, maka pemerintah daerah diharapkan untuk meninjau ulang kebijakan yang telah diterapkan agar dapat mengeksplor secara maksimal pendapatan yang bersumber dari daerah sebagai bentuk kemandirian dari daerah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh

secara simultan dan parsial dari DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku Utara serta membuktikan ada-tidaknya *flypaper effect* pada belanja Daerah Pemerintah di Provinsi Maluku Utara; membuktikan kecenderungan DAU dan PAD menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah di tahun berikutnya; dan membuktikan kecenderungan DAU dan PAD menyebabkan peningkatan pengeluaran belanja operasi atau belanja modal.

Manfaat penelitian dilihat baik dari segi teori maupun terapan antara lain sebagai masukan dan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengambil penelitian dan studi pustaka tentang keuangan daerah serta menjadi bahan evaluasi tentang kebijakan keuangan daerah bagi pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

Roemer dan Silvestre (dalam Kuncoro 2007) berpendapat bahwa *flypaper effect* secara umum dapat dipahami sebagai ketidaksepadanan pengaruh pengeluaran publik dari bantuan pemerintah federal dan peningkatan pendapatan dengan jumlah yang sama. Berapapun bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus memberikan pengaruh yang sama besarnya. Sebagai contoh adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai bantuan kepada pemerintah daerah, mestinya memberikan pengaruh yang sama besar yaitu sebesar satu rupiah pada peningkatan pendapatan pemerintah atau masyarakat lokal. Bila hal ini tidak terjadi, di mana ada kecenderungan bahwa pengaruh pengeluaran publik dalam bentuk bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak memberikan pengaruh yang sama besarnya maka hal inilah yang disebut *flypaper effect*. Interpretasi tentang *flypaper effect* ini diturunkan dari masalah "penumpang gratis" (*free-riding*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal. Di sini pemerintah lokal mendapatkan keuntungan dengan terus meningkatkan pengeluaran lokal mereka apabila pengeluaran ini dibiayai dengan transfer keuangan pemerintah pusat, karena pemerintah lokal tidak akan sama sekali membayar apa-apa (gratis), sebagai *share* dari tingkat nasional.

Dengan merilis pendapat Oates (1999), Legrenzi dan Milas (2002) dalam Abdullah (2008:34) bahwa diskusi tentang *flypaper effect* sudah secara umum mengabaikan isu-isu tentang apakah pemerintah lokal merespons/menanggapi perubahan dengan

adanya transfer keuangan pemerintah pusat sebagai hal yang simetrik atau asimetrik, kendati pendekatan ini bertujuan untuk lebih memberikan harapan yang berarti dan berguna kepada masyarakat lokal. Hal tersebut mungkin bahwa *flypaper effect* hanya beroperasi dalam satu arah saja, yaitu yang berkenaan dengan peningkatan dari pada pengurangan dalam transfer pemerintah pusat. Hipotesis semacam ini disebut "fiscal replacement" karena pemerintah lokal akan menempuh upaya-upaya yang lebih tinggi untuk meningkatkan bentuk-bentuk penerimaan yang lain untuk menjamin program-program pengeluarannya. Alternatifnya adalah, jika *flypaper effect* beroperasi dalam dua arah (simetris), pemerintah lokal akan mengurangi pengeluaran mereka sebagai suatu konsekuensi dari pengurangan dalam transfer pemerintah pusat yang diterima (Sukriy Abdullah, 2008).

Flypaper effect secara umum dipahami sebagai ketidaksamaan pengaruh pengeluaran publik dari bantuan pemerintah federal dan peningkatan pendapatan dengan jumlah yang sama. Berapapun bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus memberikan pengaruh yang sama besarnya. Sebagai contoh adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai bantuan kepada pemerintah daerah, mestinya memberikan pengaruh yang sama besar yaitu sebesar satu rupiah pada peningkatan pendapatan pemerintah atau masyarakat lokal. Bila hal ini tidak terjadi, di mana ada kecenderungan bahwa pengaruh pengeluaran publik dalam bentuk bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak memberikan pengaruh yang sama besarnya maka hal inilah yang disebut *flypaper effect* (Roemer dalam Kuncoro, 2007: 20).

Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Fenomena *flypaper effect* ini dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko dalam Abdullah 2008). Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Anomali tersebut memicu diskusi yang intensif di antara ahli ekonomi. Perdebatan tersebut menghasilkan beberapa penjelasan yang ditawarkan. Dalam bidang ekonomi, penelitian tentang *flypaper effect* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) aliran pemikiran, yaitu model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). Model birokratik meneliti *flypaper effect* dari sudut pandang birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.

Secara implisit, model birokratik menegaskan *flypaper effect* sebagai akibat dari perilaku birokrat yang lebih leluasa membelanjakan transfer daripada menaikkan pajak. Kuncoro (2007) mengistilahkan hal ini sebagai ketamakan politisi (*a greedy politicians model*). Grossman dalam Priyo (2007) melukiskannya sebagai perilaku politisi dengan cakrawala pandang yang menyempit (*myopic behavior*). Dengan demikian, *flypaper effect* terjadi karena superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer. Informasi lebih yang dimiliki birokrat memungkinkannya memberikan pengeluaran yang berlebih.

Anggaran pendapatn dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan daerah
- b. Belanja daerah
- c. Pembiayaan daerah

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau deficit APBD. Surplus anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, digunakan / dimanfaatkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ daerah, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih tahun anggaran berjalan. Pemanfaatan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Defisit anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatn daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit,

ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisah lebih perhitungan anggaran lalu, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Langkah-langkah untuk menutupi defisit disebut penerimaan pembiayaan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri atas :

- a.) Pendapatan asli daerah (PAD)
- b.) Dana Perimbangan
- c.) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan hasil daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antar pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antara daerah sehingga merupakan system transfer dana dari pemerintah.

Dasar hukum pendapatan asli di atur dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sedangkan dasar hukum perimbangan diatur dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang diterimah seperti pendapatan hibah. Dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dari otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lain.

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun

meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat di laksanakan.

Sebagai mana di atur dalam pasal 6 UUD No.33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan sumber-sumber PAD terdiri dari :

- a.) Pajak daerah
- b.) Retribusi daerah
- c.) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d.) Lain-lain PAD yang sah

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan menugaskan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pelayanan kepada dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Selain itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Khusaini, 2006).

Sebagaimana diatur dalam pasal 10 undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan dana perimbangan terdiri atas :

- a. Dana bagi hasil
- b. Dana alokasi umum
- c. Dana alokasi khusus

Dana perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pencantuman dana perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi daerah.

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang di bagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- a. Pajak bumi dan Bangunan
- b. Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB)
- c. Pajak penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.

Dana bagi hasil yang bersumber daya alam berasal dari :

- a. Kehutanan
- b. Pertambangan umum
- c. Perikanan
- d. Pertambangan minyak bumi
- e. Pertambangan gas bumi
- f. Pertambangan panas bumi.

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relative kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relative besar. Secara implisif, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai factor pemerataan kapasitas fiskal.

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah.

DAU merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi pengeluarannya. Besarnya DAU

yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka daerah tersebut masih bergantung kepada Pemerintah Pusat yang menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri dan belum siap menjadi daerah otonom seperti yang tertuang dalam UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit DAU yang diterima maka daerah tersebut mandiri dan siap menghadapi otonomi.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dan menjadi daerah otonom.

Pengaruh *Flypaper effect* pada Prediksi Belanja Daerah.

Widodo (2007:35) memberikan penjelasan bahwa dalam sebuah proses penyusunan anggaran ada sebuah teori yang dikenal dengan istilah *incrementalism*. Sistem penganggaran *Incrementalism* adalah sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan. *Incrementalism* juga terjadi pada penyusunan Belanja Daerah ditahun berikutnya dimana pemerintah daerah berusaha menambah atau mengurangi jumlah rupiah pengeluaran dan PAD yang diterima agar dana transfer yang diterima konstan dengan tahun sebelumnya atau malah bertambah.

Hipotesis.

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : adalah DAU secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

H2 : adalah PAD secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

H3 : adalah terjadi *Flypaper effect* dan cenderung menyebabkan peningkatan jumlah Belanja Daerah di tahun berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian *kuantitatif* karena dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam penelitian ini diteliti hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikategorikan sebagai variabel independent, terhadap Belanja Daerah (BD) yang dikategorikan sebagai variabel dependent, serta mendeteksi fenomena *flypaper effect*.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara yang terletak di Sofifi. Objek penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dari bulan Oktober - Desember 2013.

Jenis data yang akan diteliti adalah data sekunder, berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data penelitian bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Data yang diambil hanyalah data laporan keuangan yang telah dipublikasikan dalam rentang tahun 2004-2011. Data diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan www.bpk.go.id dan Kementerian Dalam Negeri www.kemenkeu.go.id serta DPPKAD Provinsi Maluku Utara

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan *Software* SPSS. Untuk menguji keberartian koefisien regresi secara simultan dilakukan uji-F, sedang untuk menguji pengaruh secara parsial dilakukan uji-t. Model regresi untuk uji hipotesis I adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$$

Kriteria penerimaan hipotesis III menurut Maimunah (2006:12), "Untuk dapat dikatakan telah terjadi *flypaper effect* maka hasil yang diperoleh haruslah menunjukkan nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan atau PAD tidak signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 19.557 + 0.022 \text{ PAD} + 1.517 \text{ DAU} + e$$

Dari persamaan ini maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 19.557 yang berarti bahwa jika semua variabel independen tidak mengalami perubahan, maka untuk membiayai belanja daerahnya, daerah akan melakukan pinjaman/ utang sebesar 19.557 milyar rupiah. Kemudian berdasarkan hasil analisis, jika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah maka nilai belanja daerah akan bertambah sebesar 0.022 juta rupiah. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah, maka nilai belanja daerah akan bertambah sebesar 1.517 juta rupiah.

Hasil perhitungan regresi pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah (BD) mampu dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 76.5% atau 0.765 yang ditunjukkan oleh besarnya nilai R-square (R^2). Sedangkan sisanya adalah variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Demikian juga, hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini dapat dikatakan model yang baik (*Goodness of Fit*).

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan hubungan DAU terhadap belanja daerah dalam hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika DAU meningkat, maka belanja daerah juga meningkat. Hubungan ini sesuai dengan tujuan pemberian DAU yaitu untuk meningkatkan belanja daerah. Kemudian secara parsial juga DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang ditunjukkan atas nilai Koefisien

PAD yang lebih kecil daripada DAU menandakan bahwa DAU lebih mempengaruhi Belanja Daerah daripada PAD. Besarnya pengaruh DAU terhadap belanja daerah disebabkan oleh besarnya jumlah DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, sehingga rasio DAU terhadap belanja daerah juga tinggi. Sifat DAU yang berupa *grant* dari pemerintah pusat menjadikan daerah seolah-olah menggantungkan belanja daerahnya dari alokasi dana ini. Artinya bahwa transfer dari pemerintah pusat berupa DAU menyebabkan pemerintah daerah tidak mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dalam menunjang pengeluaran pemerintah daerah.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2009) yang menemukan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan dana alokasi umum merupakan bentuk transfer dana yang paling penting selain bagi hasil. Rendahnya kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya ditambah dengan kualitas SDM yang belum memadai diperkirakan menjadi penyebab tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maimunah (2006: 11) yang menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Daerah. Hal serupa juga dinyatakan oleh Ndadari dan Adi (2008: 16) bahwa besarnya PAD suatu daerah dipengaruhi oleh besarnya alokasi DAU. Hal ini menunjukkan kecenderungan pemerintah daerah enggan untuk menggali potensi daerahnya karena mereka merasa belanja daerah sudah cukup dibiayai dengan DAU saja. Adi (2007: 13-14) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa daerah yang ditelitinya masih mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat dibandingkan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya atau terdapat kecenderungan ketika DAU yang diterima semakin tinggi maka upaya pajak pemerintah kabupaten atau kota justru semakin rendah. Hal serupa juga dinyatakan oleh Wijaya (2008: 66) dan Novianingsih (2009) dimana dana perimbangan dalam hal ini termasuk DAU merupakan variabel yang lebih besar pengaruhnya terhadap belanja daerah daripada pendapatan asli daerah

tersebut.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD)

Colombatto (2001) dalam Abdullah (2008) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Menduga power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Melihat beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Setiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Maluku Utara khususnya Kota dan Kabupaten mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing yang didapat melalui sumber-sumber yang terdapat di daerah tersebut. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga mempunyai PAD sendiri yang didapat dari retribusi daerah. Tingkat kemandirian dari suatu SKPD dapat dilihat dari PAD masing-masing SKPD yang telah diterima. Apabila suatu SKPD memperoleh PAD yang lebih besar dari dana transfer, maka SKPD tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat kemandirian karena dapat membiayai semua pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD tersebut, begitu juga sebaliknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhubungan dalam kinerja SKPD. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (PuspitaSari, 2009).

PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dan menjadi daerah otonom.

Hasil regresi menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini sesuai dengan temuan Mutmainnah (2006). Tidak signifikannya PAD dalam mempengaruhi belanja daerah disebabkan karena rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah dibandingkan dengan DAU. Tingginya proporsi dana perimbangan sebagai sumber penerimaan daerah yang mencapai 80 persen dari total penerimaan (Simanjuntak dalam Handayani, 2009) mengakibatkan PAD hanya berkontribusi sangat kecil.

Rendahnya penerimaan daerah dari PAD disebabkan oleh rendahnya upaya penggalian potensi daerah yang dicerminkan oleh fluktuatifnya *tax effort* di daerah. Padahal *tax effort* mencerminkan usaha pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatannya (Susanti, dalam Handayani 2009).

Fenomena *Flypaper effect*

Hipotesis III digunakan untuk membuktikan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai Standardized Coefficients Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.015 tidak lebih besar dari nilai Standardized Coefficients Dana Alokasi Umum yaitu sebesar 0.876 dan hanya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah artinya, terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa pemerintah provinsi Maluku utara lebih besar mengoptimalkan belanjanya dengan menggunakan dana alokasi sehingga terjadi *flypaper effect* pada anggaran pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Kuncoro (2007: 22) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa dana alokasi dari pemerintah pusat menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD.

Yang ada justru pemerintah daerah berupaya bagaimana caranya dana alokasi yang diterima dari tahun ke tahun tetap atau meningkat. Wijaya (2008: 66) dan Maimunah (2006: 11) dalam penelitiannya mempunyai persamaan pendapat mengenai temuan adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang merupakan suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakan kemampuan sendiri.

Penelitian oleh Ndadari dan Adi (2008: 17) yang didukung oleh penelitian dari Shinta (2009: 78) juga menyatakan bahwa terjadi *flypaper effect* pada dana alokasi umum yang membuktikan bahwa terjadi kecenderungan perilaku asimetris pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat. (Priyo, 2009) juga menunjukkan adanya keterikatan yang erat antara transfer pemerintah pusat dengan belanja daerah. Terdapatnya fenomena ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah daerah Jawa Tengah disebabkan karena tingginya ketergantungan daerah transfer pemerintah pusat. Yang di tunjukan oleh besarnya rasio dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah dibandingkan dengan rasio PAD terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa daerah sangat bergantung pada dana transfer tersebut. Tidak efisiennya penggunaan dana transfer dalam alokasinya terhadap belanja daerah untuk belanja infrastruktur menjadikan daerah tidak memiliki sumber penerimaan. Selain itu, menurut Kuncoro (2007) saat masyarakat (pemerintah daerah) menerima transfer maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah dan peningkatan konsumsi barang publik. Hal ini menunjukkan bahwa transfer meningkatkan konsumsi akan barang publik namun tidak menjadi substitut pajak daerah.

Besarnya efek multiplier DAU terhadap belanja daerah, bila dipandang dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan kondisi yang memprihatinkan. Karena, secara tidak langsung hubungan ini membuktikan betapa daerah memiliki ketergantungan keuangan yang sangat besar kepada pemerintah pusat. Berdasarkan pada pola hubungan dalam model, besarnya nominal DAU sangat menentukan besarnya belanja daerah pada tahun berikutnya. Diperlihatkan oleh besarnya koefisien DAU terhadap belanja daerah yang mampu

meningkatkan hingga 1.362 juta setiap kenaikan 1 juta DAU.

Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kemandirian daerah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti bahkan cenderung menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Adi (2007) serta Setiaji dan Adi (2007) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah dalam era otonomi justru mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru semakin menggantungkan diri pada DAU daripada mengupayakan peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Adi (2007), memperlihatkan indikasi kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. Sebagai pertimbangan praktis, upaya ini lebih dipilih daripada meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga sebagai konsekuensinya PAD yang diterima menjadi lebih kecil. Kondisi ini sejalan dengan pandangan para pakar ekonomi. Dominannya peran dana transfer terhadap pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah pada dasarnya tidak efektif dalam memberikan bantuan bagi pemerintah daerah terhadap aliran transfer itu sendiri (Kuncoro, 2006).

Alderete (dalam Priyo, 2006) menegaskan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer (dalam bentuk dana perimbangan) kepada daerah untuk meningkatkan belanja daerah, muncul spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer itu secara asimetris. Perilaku asimetris ini dapat dilihat dengan adanya pengeluaran yang berasal dari bantuan (*grants*) yang memberikan keuntungan pada pemerintah daerah, sedangkan di lain pihak anggaran juga berkurang. Maimunah (2006) membuktikan adanya perilaku asimetris yang ditunjukkan oleh pengaruh DAU terhadap belanja daerah dan PAD (dalam Priyo, 2006). Besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, tetapi besarnya proporsi PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah khususnya DAU begitu dominan dalam membiayai belanja daerah.

Fenomena semacam ini oleh Dollery dan Worthington (1999) dan Priyo (2009) diindikasikan sebagai ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Logikanya, setiap penerimaan

pemerintah harus berdampak terhadap besaran pengeluaran dan pada gilirannya semakin besar pengeluaran pemerintah maka pemerintah seharusnya mendapat manfaat dengan meningkatnya penerimaan pemerintah di masa mendatang, misal meningkatnya kontribusi pajak masyarakat. Artinya terdapat hubungan yang simetris antara sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila kenyataan yang terjadi sebaliknya (terjadi hubungan yang asimetris) maka dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal, dikarenakan pemerintah pusat ataupun masyarakat tidak menyadari bahwa mereka memberikan kontribusi (baik dana transfer maupun pajak/retribusi daerah) yang lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Kecenderungan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hibah pemerintah pusat secara asimetris, memberikan dampak negatif terhadap upaya peningkatan potensi daerah. Salah satu indikatornya adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data dalam penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Tidak signifikannya Pendapatan Asli Daerah dalam mempengaruhi Belanja Daerah (BD) disebabkan karena rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Besarnya pengaruh DAU terhadap belanja daerah disebabkan oleh besarnya jumlah DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, sehingga rasio DAU terhadap belanja daerah juga tinggi
3. Terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal ini berarti bahwa adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum (DAU), kondisi ini terjadi dimana pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakan pendapatan asli daerah (PAD)

Saran

Beberapa saran dan masukan yang dapat dihasilkan dari penelitian pada Tesis ini antara lain adalah:

1. Bagi pemerintah Kabupaten/ kota di Provinsi Maluku Utara, diharapkan lebih maksimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi meningkatkan persentase penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian memperluas cakupan wilayah penelitian yang antara satu kabupaten dan kabupaten lainnya yang memiliki hubungan pertanggungjawaban, sebagai contoh beberapa kabupaten dalam satu provinsi. Hal lain yang dapat diteliti adalah terjadinya *flypaper effect* yang dibandingkan tiap tahunnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukriy & Abdul Halim. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.. *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi VI Yogyakarta*
- Adi, Priyo Hari. 2008. *Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa)*. The 2nd National Conference Faculty of Economics
- Widya Mandala Catholic University. <http://lpks1.wima.ac.id/pphks/accurate/makalah/IE7.pdf>.
- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Atiah Handayani. 2009. "Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)." Skripsi Tidak Dipublikasikan, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu, Jakarta.

- Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Indonesia. Berbagai edisi penerbitan, BPS Provinsi Maluku Utara.
- _____. Ringkasan APBD Provinsi. Berbagai edisi penerbitan, BPS Provinsi Maluku Utara.
- Bagir Manan,. 1994. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga
- Bernardo Gatot Tri Bawono. 2008. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah." Tesis Tidak Dipublikasikan. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Darwanto, dan Yulia Yustika Sari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 26–28 Juli 2007
- Dwirandra. 2008. "Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002–2006." Jurnal Ilmiah. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar.
- Emelia, 2006. "Mengukur Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendorong Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur". Tesis Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Firmansyah. 2006. *Modul Panel Data Regression Aplikasi dengan Eviews 4.0*. Semarang: LSKE Firmansyah. 2008. Modul Praktek Ekonomika Dasar: Estimasi, Asumsi Klasik dan Variabel Dummy Aplikasi Eviews 4.0. Semarang: LSKE
- Gideon Tri Budi Susilo dan Priyo Hari Adi. 2007. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)" Paper disajikan pada Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometric*. The McGrow Hill Companies Inc. New York.
- Guritno Mangkoesoebroto,. 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE. <http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/> Laras Wulan Ndadari dan Priyo Hari Adi. 2008. "Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat." The 2nd National Conference UKWMS. Surabaya.
- Halim, A.. 2001. Anggaran Daerah dan Fiscal Stress, Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 16 (4): 346-357.
- Halim, A.. 2009. *Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Disertasi Doktor dalam Ilmu Ekonomi, UGM, Yogyakarta, tidak diterbitkan.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Khusaini, 2006, *Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Jakarta
- Prakosa Kesit Bambang. 2006. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY." JAAI, Vol 08 No.2
- Pangesti Kurnia Nur, 2008, Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 26–28 Juli 2007
- Mardiasmo, 2001 *Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada,, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002, *Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, JAAI
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Miyasto, 2009. *Bahan Kuliah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Miyasto, 2009. *Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai. Studi Mengenai Dampak terhadap Harga, Penerimaan dan Struktur*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Muhammad Iqbal Lubekran. 2007. “*Analisa Dampak Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Perkembangan Daerah di Indonesia Periode 2001- 004.*” Tesis Tidak Dipublikasikan. Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universita Indonesia. Jakarta.
- Maimunah, Mutiara. 2006. “*Flypaper effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.*” Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Nagathan, dan KJ Sivagnanan. 1999. “*Federal Transfer and Tax Effort of States in India.*” Indian Economic Journal.
- Ndadari, Laras Wulan, dan Priyo Hari Adi. 2008. *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat*. Makalah disampaikan dalam The 2nd National Conference UKWMS. Surabaya. 6 September 2008
- Sari Noni Puspita, 2009, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Abd) (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Pulau Jawa Periode 2009-2011)*
- Nazir M., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999 Rampai: *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Priyo Hari Adi. 2006. “*Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa- Bali).*” Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang
- Priyo Hari Adi. 2007. *Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi.. The 1st National Accounting Conference*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Pramuka Agus Bambang., 2010. “*Flypaper on Government Spending Areas in Java. Journal of Development Economics, Vol. No. 11. 1, June 2010, 1-12*”
- Rushdi Bahrul Ulum and sasna, Hadi (2010) [determinants Of Financial Performance Analysis And Detection Of Local Government Fiscal Illusion \(Case Studies in Indonesian Province in 2005 - 2008\).](#)
- Simanjuntak Daslan, 2006. menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis tidak dipublikasi, Magister Ekonomi Pembangunan USU. Medan.
- Widodo, Pambudi Tri. 2007. *Flypaper effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di*

Bali. (Studi pada Kabupaten/Kota di Bali). http://rac.uji.ac.id/server/document/Private/200807251_1265203312374.pdf. Diakses 3 September 2009

Wijaya, Sandhi. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Besarnya Belanja Daerah (Studi pada Kabupaten se-Karesidenan Pekalongan)*. Skripsi. Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. (Tidak dipublikasikan).

Walidi. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening, Tesis (tidak dipublikasikan)*. Medan. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2009.

Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan*

Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit UNDIP: Semarang.

_____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah*.

_____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2008. *Pedoman Pelaksanaan Review Atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

_____. UU No.32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah (dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)*